

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018**

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. PERENCANAAN</b>						
1	penerapan e-planning dilengkapi dengan fitur e-pokir & e-reses anggota DPRD, e-budgeting, e-monev, ASB dan data SHBJ belum terintegrasi	Pengintegrasian penerapan e-planning	1 Penetapan regulasi pengintegrasian e-planning dilengkapi dengan fitur e-pokir & e-reses anggota DPRD, e-budgeting, e-monev, ASB dan data SHBJ  2 Sentralisasi Pengelolaan infrastruktur, sistem aplikasi dan pengembangannya  3 Penyelarasan dan integrasi e-planning, e-budgeting, e-monev	Bappeda, BKAD, Kominfo, Setwan, Bagian Hukum  Kominfo  Bappeda, BKAD, Kominfo,	Terbitnya Peraturan Bupati  Program/ Kegiatan dan penganggaran tersentral di Dinas Kominfo  e-planning, e-budgeting, e-monev yang terintegrasi	Juni 2018  Oktober-November 2018  Oktober-November 2018
2	penyusunan beban kerja dan belanja program/kegiatan belum mengacu pada Analisa Standar Belanja/Biaya (ASB)	penyusunan beban kerja dan belanja program/kegiatan agar mengacu pada ASB	1 Reviu Peraturan Bupati tentang ASB  2 Sosialisasi ASB  3 Monitoring dan evaluasi implementasi ASB	Sekretariat Daerah, BKAD, Bappeda  BKAD  Sekretariat Daerah, Inspektorat	1 perubahan Perbup tentang ASB  2 Tersosialisasinya ASB  3 Implementasi ASB dalam penyusunan anggaran	Juni 2018  Juli 2018  September 2018

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
3	Penyusunan RKPD belum sepenuhnya mengacu pada RPJMD	Penyusunan RKPD agar sepenuhnya mengacu pada RPJMD	1 Membuat cascading dlm bentuk <i>logic model</i> (pohon kinerja) dengan menyelaraskan : Visi Pemda, Misi Pemda, Tujuan Pemda, Sasaran Pemda, Tujuan OPD, Sasaran OPD, Program dan Kegiatan OPD	seluruh OPD	1 tersusunnya cascading yang memadai	Oktober-November 2018
			2 Penguatan, pengendalian penyusunan RKPD melalui desain aplikasi e-planning	Bappeda, Dinas Kominfo	2 terbangunnya e-planning terintegrasi (ROPK, Renja, Pra-RKA, e-Pokir) dan dapat mengendalikan seluruh tahapan perencanaan	Oktober-November 2018
4	Anggota DPRD belum melakukan input data hasil reses ke dalam pokok-pokok pikiran sesuai user ID dalam e-planning.	Anggota DPRD agar melakukan input data hasil reses kedalam pokok-pokok pikiran sesuai user ID dalam e-planning	1 Penambahan fitur e-reses & e-pokir anggota DPRD dalam e-planning	Bappeda, Kominfo, Setwan	terbangunnya e-planning terintegrasi yang dilengkapi fitur e-reses & e-pokir	Oktober-November 2018
			2 Mengusulkan penetapan regulasi untuk pedoman anggota DPRD dalam melakukan input data pokok-pokok pikiran dan hasil reses sesuai user ID dalam e-planning	Setda, Bappeda, Kominfo, Setwan	1 rancangan regulasi pedoman pengelolaan IT yang didalamnya diantaranya mengatur pengintegrasian e-planning dilengkapi dengan fitur e-reses & e-pokir anggota DPRD, e-budgeting, e-monev dan data SHBJ	November-Desember 2018

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
					2 Draft Surat Usulan Kepada Gubernur tentang perlunya Pedoman anggota DPRD dalam melakukan input data nput data hasil reses kedalam pokok-pokok pikiran sesuai user ID dalam e-planning. Yang diterbitkan oleh Pemerintah DIY	Juni 2018
<b>B PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>						
1	Sistem aplikasi penatausahaan aset tetap dan persediaan daerah belum memadai	1 diperlukan update dan pengembangan sistem aplikasi penatausahaan aset tetap dan persediaan daerah agar memadai sesuai kebutuhan	1 Sentralisasi Pengelolaan infrastruktur, sistem aplikasi dan pengembangannya	BKAD, Kominfo,	Program/ Kegiatan dan penganggaran tersentral di Dinas Kominfo, diantaranya : agar update dan pengembangan sistem aplikasi penatausahaan aset tetap dan persediaan daerah memadai sesuai kebutuhan	Desember 2018
2	Sistem Aplikasi penatausahaan aset tetap dan persediaan daerah belum terintegrasi dengan e-planning, e-budgeting, e-monev,	1 diperlukan penyelarasan dan integrasi antara sistem aplikasi penatausahaan aset tetap dan persediaan daerah dengan e-planning, e-budgeting, e-monev,	Sentralisasi Pengelolaan infrastruktur, sistem aplikasi dan pengembangannya	BKAD, Kominfo,	Program/ Kegiatan dan penganggaran tersentral di Dinas Kominfo, diantaranya : agar terwujud penyelarasan dan integrasi antara sistem aplikasi penatausahaan aset tetap dan persediaan daerah dengan e-planning, e-budgeting, e-monev,	Desember 2018

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
3	Sertifikasi aset daerah	1 diperlukan optimalisasi sertifikasi aset daerah	identifikasi dan penyusunan program/kegiatan sertifikasi aset daerah	BKAD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Seluruh Aset daerah tersertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Desember 2019
3	Pencatatan dan pelaporan hasil PBJ berupa aset tetap dan persediaan belum tertib	Penertiban pencatatan dan pelaporan hasil PBJ untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan barang daerah	<p>1 Reviu dan optimalisasi penerapan SOP pencatatan dan pelaporan barang daerah</p> <p>2 Update dan penyempurnaan sistem aplikasi SIM Aset dan Persediaan agar dapat memberikan solusi permasalahan yang dihadapi saat ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan penyusutan</li> <li>- Kecukupan rincian /kode barang</li> <li>- harga satuan persediaan agar sesuai dengan FIFO</li> <li>- Penyelarasan dan integrasi ke SIPKD</li> </ul>	<p>Setda, BKAD, Semua OPD</p> <p>BKAD, Kominfo</p>	<p>Tertib pencatatan dan pelaporan hasil PBJ sesuai dengan SOP</p> <p>Sistem aplikasi SIM Aset dan Persediaan terupdate</p>	<p>Desember 2018</p> <p>Desember 2018</p>

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
1	pemanfaatan sistem informasi barang/jasa belum tertib	diperlukan ketaatan terhadap pemanfaatan Sistem Informasi Barang dan Jasa	1 Sosialisasi kebijakan tentang pedoman pelaksanaan PBJ	Sekretariat Daerah, BKAD	terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang pedoman pelaksanaan PBJ untuk meningkatkan pemahaman bagi pelaksana	Desember 2018
			2 Evaluasi/Monitoring ketaatan OPD dalam pemanfaatan Sistem Informasi Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah	terwujudnya ketertiban bagi seluruh OPD dalam pemanfaatan Sistem Informasi Barang dan Jasa	Maret 2019
2	Penggunaan e-tender dan e-purchasing (menggunakan e-catalog) belum maksimal, kecuali yang disebabkan faktor eksternal	optimalisasi Penggunaan e-tender dan e-purchasing (menggunakan e-catalog), kecuali yang disebabkan faktor eksternal	1 Penyusunan/reviu kebijakan pemerintah daerah tentang pedoman pelaksanaan PBJ yang didalamnya mengatur Penggunaan e-tender dan e-purchasing (menggunakan e-catalog)	Sekretariat Daerah, BKAD	terwujudnya kebijakan Pemerintah daerah tentang pedoman pelaksanaan PBJ yang didalamnya mengatur Penggunaan e-tender dan e-purchasing (menggunakan e-catalog)	Desember 2018
			2 Evaluasi/Monitoring ketaatan OPD dalam : - Input Perencanaan Pengadaan BJ ke dlm SIRUP - Penggunaan e-tender - e-purchasing / e-catalog	Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, BKAD	Terwujudnya ketaatan OPD dalam : - Input Perencanaan Pengadaan BJ ke dlm SIRUP - Penggunaan e-tender - e-purchasing / e-catalog	Maret 2019

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
<b>D PERIZINAN</b>						
1	Integrasi pelayanan perizinan dalam satu atap pada DPMPT belum optimal	diperlukan penyusunan / revidi kebijakan pemerintah daerah tentang Integrasi pelayanan perizinan dalam satu atap pada DPMPT	1 penyusunan / revidi kebijakan pemerintah daerah tentang Integrasi pelayanan perizinan dalam satu atap pada DPMPT  2 Evaluasi Monitoring terhadap pelaksanaan integrasi pelayanan perizinan dalam satu atap pada DPMPT	Setda, DPMPT  Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah	Diterbitkannya kebijakan/perubahan kebijakan pemerintah daerah tentang Integrasi pelayanan perizinan dalam satu atap pada DPMPT  pelaksanaan integrasi pelayanan perizinan dalam satu atap pada DPMPT berjalan dengan optimal	September-Oktober 2018  Desember 2018
2	Penerapan Aplikasi Sistem Perizinan (meliputi Perizinan online, fitur e-tracking, e-pengaduan, e-signature) belum optimal	diperlukan Penyusunan kebijakan Pemerintah daerah terkait pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan (meliputi Perizinan online, fitur e-tracking, e-pengaduan, e-signature)	1 Penyusunan kebijakan Pemerintah daerah terkait pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan (meliputi Perizinan online, fitur e-tracking, e-pengaduan, e-signature)	DPMPT, Dinas Kominfo	Penyusunan kebijakan Pemerintah daerah terkait pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan (meliputi Perizinan online, fitur e-tracking, e-pengaduan, e-signature)	September-Oktober 2018

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
			2 Evaluasi Monitoring terhadap pengembangan Aplikasi Sistem Perijinan (meliputi Perijinan online, fitur e-tracking, e-pengaduan, e-signature)	Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah	pengembangan Aplikasi Sistem Perijinan (meliputi Perijinan online, fitur e-tracking, e-pengaduan, e-signature) dengan optimal	Desember 2019
4	Penetapan dan penerapan SOP serta Kode Etik pada lembaga pelayanan perizinan belum optimal	diperlukan penyusunan/reviu kebijakan pemerintah daerah tentang penetapan dan penerapan SOP serta Kode Etik pada lembaga pelayanan perizinan	1 Penyusunan/reviu kebijakan pemerintah daerah tentang penetapan dan penerapan SOP serta Kode Etik pada lembaga pelayanan perizinan  2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP serta Kode Etik pada lembaga pelayanan perizinan	DPMPT, Sekretariat Daerah  Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah	Terwujudnya kebijakan/perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang penetapan dan penerapan SOP serta Kode Etik pada lembaga pelayanan perizinan  pelaksanaan SOP serta Kode Etik pelayanan Perizinan berjalan optimal	Desember 2018  Desember 2018

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
5	Kerjasama dengan Dirjen Pajak (JDP) termasuk pelaksanaan Tax clearance dan BPJS dalam pelayanan perizinan belum optimal	Diperlukan penyusunan/reviu kebijakan pemerintah daerah tentang Kerjasama dengan Dirjen Pajak (JDP) termasuk pelaksanaan Tax clearance dan BPJS dalam pelayanan perizinan	<p>penyusunan/reviu kebijakan pemerintah daerah tentang Kerjasama dengan Dirjen Pajak (JDP) termasuk pelaksanaan Tax clearance dan BPJS dalam pelayanan perizinan</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama dengan Dirjen Pajak (JDP) termasuk pelaksanaan Tax clearance dan BPJS dalam pelayanan perizinan</p>	<p>DPMPT, Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah</p>	<p>Terwujudnya kebijakan /perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kerjasama dengan Dirjen Pajak (JDP) termasuk pelaksanaan Tax clearance dan BPJS dalam pelayanan perizinan</p> <p>Kerjasama dengan Dirjen Pajak (JDP) termasuk pelaksanaan Tax clearance dan BPJS dalam pelayanan perizinan berjalan dengan optimal</p>	Desember 2019
<b>E MANAJEMEN SDM APARATUR</b>						
1	Proses Manajemen PNS belum optimal (Perencanaan, Pengangkatan, Penataan sampai dengan Pemberhentian)	diperlukan penyusunan/reviu kebijakan Pemerintah Daerah tentang Roadmap manajemen SDM	<p>penyusunan/reviu kebijakan Pemerintah Daerah tentang Roadmap manajemen SDM</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Roadmap manajemen SDM</p>	<p>Sekretariat Daerah, BKPPD</p> <p>Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah</p>	<p>Terwujudnya kebijakan /perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Roadmap manajemen SDM</p> <p>Pelaksanaan Roadmap manajemen SDM berjalan dengan optimal</p>	<p>November 2018</p> <p>Desember 2018</p>



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANS I TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
2	<p>penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja belum optimal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPP masih lebih banyak mempertimbangkan faktor statis</li> <li>- TPP belum mencerminkan kinerja pegawai</li> </ul>	<p>diperlukan penyusunan/reviu kebijakan Pemerintah Daerah tentang penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 penyusunan/reviu kebijakan Pemerintah Daerah tentang penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja</li> <li>2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja</li> </ol>	<p>Sekretariat Daerah, BKPPD, BKAD</p> <p>Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah</p>	<p>Terwujudnya kebijakan /perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja</p> <p>Pelaksanaan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja berjalan dengan optimal</p>	<p>Desember 2018</p> <p>Desember 2019</p>
<b>F Penguatan Pengawasan</b>						
1	<p>Jumlah dan kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Auditor di Inspektorat masih sangat kurang</p>	<p>penambahan kekurangan formasi dan peningkatan kompetensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan usul kepada MENPAN RB penambahan formasi pegawai yang akan didudukkan pada JFT</li> <li>2 Diklat peningkatan kompetensi melalui diklat penjenjangan dan diklat substantif sesuai hasil analisis <i>gap competency</i></li> </ol>	<p>Setda, Inspektorat, BKPPD</p> <p>Inspektorat</p>	<p>Terpenuhinya kekurangan formasi JFT di Inspektorat Daerah</p> <p>Terpenuhinya <i>Gap Competency Auditor</i></p>	<p>Januari 2019</p> <p>Januari 2019</p>

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
2	Plafon anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program kegiatan inspektorat daerah belum memadai	penambahan plafon anggaran pelaksanaan program kegiatan inspektorat daerah agar lebih memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian indikator kinerja pengawasan fungsional	menambah plafon anggaran pelaksanaan program kegiatan inspektorat daerah agar lebih memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian indikator kinerja pengawasan fungsional	Setda, Bappeda, Inspektorat, BKAD	terpenuhinya kebutuhan anggaran Inspektorat Daerah	
<b>G PENGEMBANGAN TEKNOLOGI APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR</b>						
1	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal	Penyusunan kebijakan daerah terkait Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>1 Menyusun Peraturan Bupati tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>2 Penyusunan road map pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.</p>	<p>Setda, Dinas Kominfo, Bappeda, BKAD, BKPPD, DPMPT, Dukcapil</p> <p>Kominfo, Setda</p>	<p>Terbitnya Peraturan Bupati tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>Terbitnya road map pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.</p>	<p>Desember 2018</p> <p>Desember 2018</p>

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
			3 Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan Tata Kelola serta pelaksanaan roadmap pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah	penerapan kebijakan Tata Kelola serta pelaksanaan roadmap pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi berjalan dengan optimal	Desember 2019
2	Ketersediaan programmer di Diskominfo kurang	penambahan kekurangan formasi dan/pengadaan Tenaga Bantu	Melakukan usul kepada MENPAN RB penambahan formasi dan/melakukan pengadaan Tenaga Bantu	Kominfo, BKPPD, Setda	Terpenuhinya kekurangan formasi dan/ Tenaga Bantu programmer	Januari 2019
3	Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) belum optimal	Penyusunan kebijakan daerah terkait Pengelolaan SID	<p>1 Menyusun Peraturan Bupati dan pedoman teknis terkait Pengelolaan SID :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan SOP</li> <li>- Penetapan admin &amp; Operator Desa</li> <li>- Informasi wajib yang harus diupload</li> <li>- negatif list informasi</li> <li>- pengaturan teknis lainnya yang diperlukan</li> </ul> <p>2 Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan Pengelolaan SID</p>	Bappeda, Setda, DP3AKBPMD Dinas Kominfo,	<p>Terbitnya Perbup tentang SID dan pedoman teknis terkait Pengelolaan SID</p> <p>penerapan kebijakan Pengelolaan SID berjalan dengan optimal</p>	<p>Desember 2018</p> <p>Desember 2019</p>

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	OPD/INSTANSI TERKAIT	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN (Bulan/ Tahun)
1	2	3	4	5	6	7
<b>H LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN PARIWISATA</b>						
1	Pelestarian ekosistem dan Lingkungan pada obyek wisata belum optimal	Optimalisasi Pelestarian ekosistem dan Lingkungan pada obyek wisata	<p>1 Sosialisasi Pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pariwisata</p> <p>2 Pengendalian dampak lingkungan pada obyek wisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembangunan SANIMAS</li> <li>- Pembangunan / pemberdayaan pokmas dalam pengolahan limbah</li> </ul> <p>Penanggulangan dan pengendalian abrasi pantai</p> <p>Penanggulangan dan pengendalian tanah longsor pada obyek wisata alam pegunungan dan embung</p> <p>Penanggulangan dan pengendalian menurunnya kualitas lingkungan pada obyek wisata alam susur sungai/Goa</p>	<p>DLH, Dinas Pariwisata</p> <p>DLH, Dinas Pariwisata</p>	<p>Peningkatan pemahaman masyarakat di kawasan obyek wisata tentang lingkungan hidup</p> <p>kelestarian lingkungan dan Kenyamanan wisatawan meningkat</p>	<p>November 2018</p> <p>Desember 2019</p>

Wonosari, 11 Mei 2018

Bupati Gunungkidul

Badingah, S.Sos

